

## AKTIVITAS INTERNASIONAL GERAKAN SEPARATISME PAPUA

### INTERNATIONAL ACTIVITIES OF PAPUA SEPARATIST MOVEMENT

*Poltak Partogi Nainggolan\**

Naskah diterima 15 September 2014,  
direvisi 1 Oktober 2014, disetujui 20 Oktober 2014

#### Abstract

*Activities of Papua separatist movement tend to increase in the last few years, including in international arena to gain wider support. This essay is part of 2014 individual research report, for which data collections were carried out in Jakarta and Papua through library research and in-depth interviews with various experts and stakeholders. Field research and observation were conducted in Jayapura and Jayawijaya municipalities, and also Manokwari city. This descriptive and analytical research applied a qualitative method, with which the secondary and primary data resulted from in-depth interviews were crosschecked after previously thoroughly selected. Research findings reveal increasing activities of Papua separatist movement in international arena by using opportunities to build and spread their opinions and influences. The Indonesian government, in contrast, gives adequate responses to reduce their international impacts.*

**Keywords:** Papua, separatism, OPM, MSG, international activities

#### Abstrak

Aktivitas gerakan separatis Papua terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui aksi yang dilakukan di dunia internasional. Tulisan ini bagian dari riset yang dilakukan tahun 2014, dengan pengumpulan data di Jakarta dan Papua, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli dan para pemangku kepentingan yang beragam. Pengumpulan data dan observasi juga dilakukan di Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, dan Kota Manokwari. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan meng-cross-check data sekunder dan primer yang diperoleh dari wawancara secara mendalam, setelah terlebih dulu dipilah. Temuan penelitian mengungkap semakin aktifnya kegiatan gerakan separatis Papua di fora internasional, dengan berupaya terus mencari kesempatan dan membangun opini dan pengaruh mereka. Pemerintah Indonesia berupaya merespons secara moderat untuk mencapai tujuannya dalam meredam dampak internasional yang diakibatkannya.

**Kata kunci:** Papua, separatisme, OPM, MSG, internasional

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak jatuhnya Pemerintahan Orde Baru Soeharto tahun 1998, aktivitas gerakan yang menuntut dan memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bangkit kembali. Naiknya Habibie, yang kemudian digantikan Abdurahman Wahid ditandai dengan maraknya tuntutan kemerdekaan Papua. Selanjutnya, masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputeri dan

dua kali Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak sepi dari perjuangan tuntutan kemerdekaan dan gerakan separatisme Papua, yang diperjuangkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan organisasi sempalannya. Empat kali masa pemerintahan sipil dan eks-militer pasca-Soeharto, telah ditandai pula oleh aksi-aksi bersenjata kelompok separatis, yang silih berganti, dengan pemimpin yang berbeda, namun satu tujuan, hendak mewujudkan kemerdekaan Papua dan menganulir hasil plebisit Penentuan Pendapat Rakyat (*Act of Free Choice* --Pepera) yang dilakukan PBB tahun 1969, di bawah kordinasi UNTEA, yang mengawasi transisi Papua di bawah Indonesia sejak 1963, berdasarkan *The New York*

\*Profesor Riset Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Lembaga: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Alamat: Gedung Nusantara I Lt. 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270. dapat dihubungi di e-mail: [pptogin@yahoo.com](mailto:pptogin@yahoo.com).

*Agreement*. Maraknya aksi-aksi militer gerakan separatis Papua diikuti pula kampanye kemerdekaan Papua dari Indonesia di dunia internasional, mulai dari lingkungan kawasan terdekat, yakni Pasifik Selatan hingga yang lebih jauh seperti Eropa dan Amerika, serta dalam organisasi multilateral seperti Uni Eropa dan global, yaitu PBB.

Aksi-aksi bersenjata dan kampanye internasional gerakan separatis Papua ini merupakan gambaran dari realitas masih adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat Papua yang belum dan tidak dapat menerima hasil Pepera tahun 1969, yang dinilai telah direkayasa oleh pemerintahan militer Soeharto untuk kepentingan politik integrasi nasionalnya. Kampanye internasional separatisme Papua melalui arena diplomasi itu sendiri merupakan kelanjutan dari keterbatasan gerakan separatis dalam melakukan perlawanan fisik melalui berbagai aksi militer, mengikuti tesis Clausewitz, yang menyatakan bahwa diplomasi adalah kelanjutan perang dalam bentuk lain.<sup>1</sup> Seperti halnya perjuangan bersenjata, kampanye internasional dan perjuangan diplomasi gerakan separatis Papua juga mengalami kondisi pasang-surut, seiring dengan kondisi kapasitas aktor-aktornya dan dukungan para simpatisannya dalam mempengaruhi opini internasional dan pengambilan keputusan di meja-meja perundingan multilateral. Tetapi, seperti halnya konflik berskala rendah yang mengalami fluktuasi, kampanye internasional gerakan separatis Papua melalui jalur diplomasi formal dan publik --jalur satu hingga tiga, yang dilakukan pemerintah, parlemen, dan media massa-- bukan berarti sudah habis atau lenyap sama sekali, selama gaung kampanyenya belum hilang sama sekali dari peredaran, termasuk yang muncul melalui fasilitas media publik, khususnya internet.

Belajar dari strategi ahli komunikasi dan propaganda, kampanye internasional, atau diplomasi internasional di era kemajuan teknologi yang pesat, semakin efektif perannya

dan cepat dicapai hasilnya jika dijalankan secara intensif. Hasilnya akan semakin optimal, jika kampanye internasional dilakukan secara kontinyu dalam jangka panjang, dengan penggunaan media komunikasi yang beragam. Jika kampanye internasional lebih bersifat propaganda, tidak lepas dari upaya melebih-lebihkan dan manipulatif, langkah diplomasi internasional bersifat lebih realistis, karena harus melakukan pendekatan fisik (tatap muka) untuk mempengaruhi pihak lain, terlebih terhadap mereka yang belum memiliki simpati dengan aspirasi si pelaku (aktor) secara langsung.

Muncul dan maraknya kembali gerakan separatisme Papua, yang diikuti dengan berbagai kampanye internasional dan perjuangan di arena diplomasi internasional, telah membawa kondisi wilayah bagian paling timur Indonesia itu dari semula lebih terisolasi, sebagai isu lokal, menjadi perhatian (komunitas) internasional. Internasionalisasi Papua memang menjadi buah dari kebijakan sekuritisasi Papua melalui pendekatan keamanan yang berlebihan selama periode Soeharto, dan gagalnya implementasi pendekatan kesejahteraan melalui Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di era reformasi. Internasionalisasi Papua, walaupun secara sadar tidak diinginkan sama sekali oleh Pemerintahan Megawati, tetapi pada eranya mengalami perkembangan. Karena, di satu sisi, kemampuan diplomasi internasional gerakan separatis yang semakin meningkat dan berhasil, dan di lain pihak, buruknya kinerja pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan pekerjaan rumah terkait isu-isu separatis di dalam negeri. Ketidakmampuan rezim Megawati melanjutkan reformasi sektor keamanan secara tuntas dan mengontrol secara efektif militer di era baru pasca-militer, dan terbatasnya kinerja diplomasi Kementerian Luar Negeri dalam menangani isu-isu separatisme Papua dan manuver-manuver kampanye internasional para aktor non-negara, turut berkontribusi terhadap meningkatnya

<sup>1</sup> Carl von Clausewitz, *On War*, Radford Virginia: Wilder Publications, 2008, p. 37.

perlawanan dan pamor gerakan tersebut di dunia internasional.

Secara geografis, populasi dan budayanya, Papua sulit diingkari terkait dengan Pasifik Selatan. Integrasi dengan NKRI memang lebih bersifat politis, tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme dan perkembangan politik yang terjadi pasca-pendudukan Belanda. Dalam konteks inilah dapat dilihat relevansi gerakan separatisme Papua dengan cara perjuangan baru mereka di arena diplomasi internasional, yang mencoba meraih simpati dan dukungan dari lingkungan regional terdekat, yakni bangsa-bangsa di Pasifik Selatan serta Australia dan Selandia Baru. Mengingat pengakuan internasional juga merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk berdirinya sebuah negara yang independen, maka kampanye internasional dan perjuangan diplomasi gerakan separatis Papua bukan merupakan strategi dan modus perjuangan baru. Meraih dukungan internasional atas upaya memperoleh kemerdekaan sudah ada sejak lama, seperti halnya perjuangan kemerdekaan dan upaya Indonesia memperoleh pengakuan internasional di PBB, melalui kampanye internasional dan perjuangan diplomasi, antara lain, di India, Australia, dan Mesir, dengan mendirikan kantor perwakilan (kepentingan) Indonesia di sana.

## B. Perumusan Masalah

Sejak sebelum dilaksanakannya Pepera, Papua telah mendapat perhatian internasional, karena merupakan wilayah eks-kolonial, wilayah jajahan yang harus diselesaikan proses dekolonisasinya. Amerika Serikat (AS) telah berperan besar dalam mendukung kebijakan pemerintah Soekarno dan Soeharto untuk tetap menyatukan Papua dalam wilayah Indonesia, eks-Hindia Belanda. Untuk tujuan memperoleh dukungan Indonesia dalam Perang Dingin, dan menjauhkannya dari hubungan yang semakin erat dengan Uni Soviet dan Blok Timur, yang sangat kuat mendukung pengembangan kekuatan militer Indonesia dalam merebut Irian Barat (Papua), serta untuk menghambat

perkembangan komunisme di kawasan Asia Tenggara, sikap AS kemudian banyak menolong Indonesia dalam menekan Belanda, agar tidak dapat mempertahankan posisi politik dan pengaruhnya sebagai bekas negara penjajah, untuk dapat mengontrol Papua. Dukungan AS atas Indonesia membuat pelaksanaan Pepera berjalan lancar, dan hasil referendum atau plebisitnya tidak pernah diganggu-gugat hingga beberapa dasa warsa ke depan, sejalan dengan berhasilnya perusahaan multinasional (MNC) tambang terbesar di dunia asal AS, Freeport McMoRan, mendapatkan konsesi jangka panjang untuk mengeksploitasi kekayaan tambang tembaga dan emas di Grassberg, Papua sejak tahun 1967.

Upaya kampanye internasional dan jalur diplomasi gerakan separatisme Papua telah diperluas, dengan memanfaatkan jalur parlemen atau diplomasi parlemen. Inisiatif mereka tampak lebih progresif dengan upaya salah satu tokohnya, Benny Wenda, yang pernah ditangkap aparat keamanan Indonesia dan melarikan diri ke Inggris. Wenda, aktivis Majelis suku-suku Papua Barat, telah berhasil melobi Westminster (Majelis Rendah, House of Common) untuk meluncurkan *International Parliamentarians for West Papua*<sup>2</sup> sehingga lobi Papua Barat sudah terbentuk di Parlemen Inggris, tidak hanya DPR AS. Lebih jauh lagi, Benny Wenda telah mendirikan kantor perwakilan *Free Papua Movement* (Organisasi Papua Merdeka --OPM) di Kota Oxford, Inggris.<sup>3</sup>

Aktivitas kampanye internasional gerakan separatisme Papua terus meningkat, dengan pendirian kantor-kantor sekretariat perlawanan baru, seperti yang terakhir di Den Haag, Belanda. Dengan demikian, jika upaya internasionalisasi Papua terus berlangsung dan melebar ke mana-mana tanpa bisa dibendung dan dihentikan, hal ini secara gradual dapat membahayakan masa depan Papua dalam NKRI. Sementara itu, negara-negara di Pasifik Selatan, yang dikenal selama ini sebagai salah

<sup>2</sup> Lihat "About the Campaign," Free West Papua, <http://freewestpapua.org/background/>, diakses 28 Maret 2014.

<sup>3</sup> Yanto Soegiarto, "Isolate Benny Wenda and stop the attention seeking," *Jakarta Globe*, diakses 28 Maret 2014.

satu pendukung internasional OPM di fora internasional, terutama Fiji dan Vanuatu, bersama-sama dengan negara anggota dan kekuatan lain organisasi kerja sama di kawasan, *Melanesia Spearhead Group* (MSG), seperti Kepulauan Solomon dan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (*Front de Liberation Nationale Kanak Socialiste* –FLNKS), menyoroti dan menyampaikan pandangan kritis terhadap perkembangan pembangunan dan kondisi dalam negeri Papua.

Upaya internasionalisasi gerakan separatisme Papua tidak berhenti di sini. Inisiatif dan aktivitas OPM semakin beragam dan kreatif. Terakhir, mereka mengorganisasi upaya kampanye internasional untuk menarik perhatian masyarakat dunia, dengan cara memancing emosi mereka, meniru para aktivis dan simpatisan gerakan Palestina merdeka dengan menggunakan perahu kecil, menggunakan nama yang sama, yakni Flotilla, melakukan pelayaran lintas negara. Kegiatan pelayaran, sekaligus kampanye tersebut meminta perhatian masyarakat dunia atas berbagai pelanggaran HAM di masa lalu, yang dituduhkan dilakukan aparat keamanan Indonesia terhadap penduduk pribumi Papua. Melihat kian gencarnya kampanye internasional dan berbagai langkah diplomasi yang dilakukan di forum dunia oleh gerakan separatis Papua, muncul kemudian pertanyaan, mengapa kampanye dan diplomasi internasional menjadi pilihan alternatif dalam perjuangan gerakan separatisme dan kemerdekaan Papua. Oleh karena itu menjadi penting untuk diteliti dan dibahas mengapa kampanye dan diplomasi internasional gerakan separatisme Papua yang dilakukan oleh para aktor individual dan LSM menjadi sebuah persoalan serius. Pertanyaan-pertanyaan ini logis, sebab di luar OPM, organisasi dan para aktivis HAM juga gencar melakukan kampanye internasional dan diplomasi untuk menekan Pemerintah Indonesia dalam sikap dan kebijakan selanjutnya terhadap Papua.

Bersamaan dengan gagalnya pelaksanaan Otsus Papua sejak 2001 dan

munculnya tuntutan Otsus Plus yang mencantumkan klausul diberikannya hak rakyat Papua untuk menentukan pendapat akhir melalui referendum, serta meningkatnya kekhawatiran atas intervensi asing atas perkembangan kondisi Papua, bukanlah hal yang berlebihan, jika kemudian, separatisme ditempatkan pada posisi teratas ancaman keamanan yang dihadapi dewasa ini oleh pemerintah pusat. Juga menjadi logis, jika perspektif pemerintah pusat menempatkan separatisme Papua sebagai ancaman utama Indonesia dewasa ini, sehingga jika pemerintah pusat tidak hati-hati dalam menanganinya, akan membahayakan keutuhan NKRI.<sup>4</sup> Secara realistis, baik aktor negara maupun non-negara, memberikan kombinasi ancaman yang bersifat akumulatif, yang bersifat militer dan non-militer terhadap Papua. Hal ini kemudian akan mempengaruhi integritas teritorial Indonesia karena mungkin akan muncul intervensi politik asing berlatar belakang pemenuhan atas kebutuhan Sumber Daya Alam (SDA) yang tinggi. Demikian pula, akan meningkat aksi-aksi pemberontakan bersenjata, penyelundupan dan penguasaan senjata, amunisi, dan bahan peledak, sejalan dengan maraknya aktivitas gerakan separatisme di sana.

Beberapa pertanyaan penting yang dijawab dalam riset ini adalah: bagaimana kampanye dan diplomasi internasional gerakan separatisme, terutama yang dilakukan OPM? Aktivitas apa saja yang telah dilakukan gerakan separatisme Papua, khususnya OPM selama ini dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya di fora internasional? Kemudian, bagaimana respons Pemerintah Indonesia selama ini dan perbaikan ke depan dalam menghadapi kampanye internasional gerakan separatisme Papua?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, sekalipun baru merupakan penelitian awal, diharapkan sekali

<sup>4</sup> Toto Permanto, "Kebijakan pada Aspek Pertahanan dalam Pengelolaan Keamanan Maritim di Kawasan," makalah presentasi, Jakarta: Kementerian Pertahanan, hlm. 9.

dapat memberikan informasi tentang kampanye internasional gerakan separatisme Papua dan perkembangan aktivitasnya selama ini serta implikasinya terhadap kepentingan Indonesia di dunia internasional. Dengan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diberikan masukan dan rekomendasi bagi para anggota DPR-RI, khususnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait, terutama Komisi I dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) mengenai masa depan Papua, solusi atas masalah separatisme di sana, dan kebijakan pemerintah pusat pada umumnya. Lebih spesifik lagi, hasil penelitian akan memberikan masukan dan rekomendasi bagi para anggota Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus Papua, yang dibentuk untuk membantu pemerintah pusat dan parlemen dalam mengevaluasi kebijakan Otonomi Khusus Papua.

#### D. Kerangka Pemikiran

Separatisme merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan oleh mereka, para aktor non-negara, melalui segala bentuk aktivitas yang merongrong dan mengganggu, yang berakibat mengancam integritas wilayah dan kedaulatan, serta kelangsungan dan masa depan negara. Aksi-aksi separatisme di Indonesia, ancamannya berimplikasi negatif pada prospek NKRI, dalam jangka pendek, apalagi dalam jangka panjang. Karena dampaknya yang serius dewasa ini, oleh para penilai dan penyusun kebijakan strategis pertahanan-keamanan Indonesia di Kemenhan, gerakan separatisme di Papua dinilai sebagai hal yang paling mengancam eksistensi NKRI.<sup>5</sup>

Begitu pula, gerakan separatisme Papua jauh lebih membahayakan eksistensi NKRI dibandingkan dengan implikasi yang ditimbulkan oleh konflik teritorial akibat klaim kedaulatan wilayah. Keberadaan para pelaku dan simpatisan gerakan separatisme Papua di mancanegara atau dalam pengasingan akan menyebabkan masalah-masalah domestik Papua kian terekspos dan terbuka lebar untuk diketahui dan diintervensi, khususnya terhadap

kebijakan pemerintah pusat yang tidak memihak pada kelompok pribumi Papua,<sup>6</sup> sehingga aktivitas para pelaku dan pendukung gerakan separatisme Papua secara langsung dan tidak langsung menimbulkan ketidaknyamanan.

Munculnya ketidaknyamanan ini logis, karena (adanya) pengakuan internasional adalah salah satu syarat terbentuknya negara, atau diakuinya secara resmi berdirinya sebuah negara yang independen, selain terdapatnya sebuah wilayah dengan penduduknya, yang sejak lama telah menuntut kemerdekaan. Jadi, dalam konteks inilah, terjadi pertentangan kepentingan atau konfrontasi antara aparat keamanan Indonesia yang merasa tidak nyaman dengan para pelaku dan pendukung gerakan separatisme Papua yang membutuhkan pengakuan internasional atas perjuangan mereka melalui berbagai aktivitas diplomasi di fora internasional. Berbagai jalur diplomasi pun kemudian dilancarkan, secara resmi dan tidak resmi, oleh aktor negara dan non-negara, yang dikenal selama ini sebagai Organisasi Non-Pemerintah (*ornop*), Lembaga Swadaya Masyarakat (*LSM*), organisasi masyarakat sipil (*civil society*), yang berbendera dan aktivis lokal maupun internasional.

Bagi para pendukung gerakan separatisme Papua sendiri, diplomasi internasional OPM memberi ruang (*arena*) alternatif untuk meningkatkan *leverage* mereka di hadapan komunitas atau dunia internasional dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka untuk merdeka dari Indonesia. Dengan kata lain, melalui aksi-aksi diplomasi internasional, OPM dapat meningkatkan daya tawar mereka terhadap pemerintah pusat (Indonesia) yang anti sama sekali dengan gagasan separatisme. Dalam hal ini, kelompok separatis Papua dapat memanfaatkan diplomasi internasional sebagai wahana sekaligus cara (taktik dan bagian dari strategi) untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Dengan wahana diplomasi internasional, minimal mereka dapat mencari

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 6.

teman dan simpati, yang dapat memperluas dukungan bagi perjuangan fisik, yang dilakukan sayap militer gerakan separatis Papua. Jadi, dapat dikatakan arena dan perjuangan diplomasi merupakan sayap lain, sebagai pelengkap perjuangan sayap militer, sebagai upaya total atau komprehensif untuk mencapai hasil optimal dalam mencapai tujuan mereka: memperoleh kemerdekaan.

Kaitan antara perang dan diplomasi sejak lama telah dilihat oleh ahli strategi perang modern, Carl von Clausewitz. Dalam karya klasiknya, *On War* (1832),<sup>7</sup> yang menjadi acuan hingga kini, diplomasi dianalisis sebagai perang yang dilanjutkan dalam wujud lain, atau perang yang mengambil lokasi di tempat yang berbeda, atau sejalan dengan pemahaman ini, sebagai kelanjutan dari perang di medan atau mandala yang berbeda. Di sana tetap dibutuhkan apa yang diidentifikasi sebagai strategi, taktik, lawan, teman, pencapaian target, kemenangan, kekalahan, dan kerjasama.<sup>8</sup> Namun, dalam hal ini, peralatan perang seperti mesiu dan senjata digantikan dengan pena dan kertas kerja. Sedangkan keahlian bertempur di lapangan digantikan dengan kemampuan dalam berbicara dan mempengaruhi lawan melalui berbagai lobi di berbagai pertemuan formal dan informal serta forum perundingan, semua upaya yang dikenal sebagai diplomasi.

Kemampuan komunikasi memainkan peran sentral di meja-meja perundingan untuk memenangkan sebanyak mungkin dukungan lawan dan kawan. Pemanfaatan alat-alat komunikasi dengan teknologi canggih sangat membantu kesuksesan dalam pencapaian target dan tujuan di meja-meja perundingan. Dalam perang modern, media massa juga berperan dalam menyukseskan kemenangan. Adakalanya, arah perang sulit diramalkan, sehingga perang atau diplomasi berlangsung seperti yang tidak diharapkan, termasuk dalam

perang modern sekalipun. Sebagai konsekuensinya, kemampuan dalam menggunakan media komunikasi sangat membantu dalam memenangkan perang dan dalam mencapai tujuan perjuangan diplomasi. Peran komunikasi untuk mencapai tujuan kemenangan perang dan perundingan memperoleh perhatian khusus pasca-Perang Dunia II. Peran propaganda semakin dipertegas dengan pemanfaatan jurnalisme perang yang jauh lebih terencana dan diandalkan untuk pencapaian tujuan yang maksimal. Kemenangan Viet Nam atas AS dalam memenangkan tujuan akhir perang sangat terbantu oleh propaganda anti-Perang Viet Nam yang dibantu oleh semangat kebebasan media massa yang tinggi di dunia internasional dan dalam negeri AS. Pemerintah AS yang unggul dengan berbagai persenjataan modern yang dimilikinya, secara gradual mengalami kekalahan demi kekalahan, sehingga pada akhirnya harus meninggalkan Viet Nam dan menyerahkannya kepada rezim komunis, lawannya, setelah secara kontinyu gagal meraih dukungan opini internasional.

Dengan semakin cepat dan meluasnya arus globalisasi, akibat kemajuan teknologi yang pesat, kampanye gerakan separatisme semakin mudah dilakukan serta memperoleh perhatian dan dukungan simpati dunia internasional. Media massa, elektronik dan non-elektronik, bahkan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan lain-lain, turut berperan dalam mempengaruhi opini dunia untuk memenangkan, baik kepentingan yang bersifat individual, kelompok, maupun nasional, serta lebih luas dari itu. Demikian pula, perang di dunia maya (*cyber war*) atau perang yang menggunakan media elektronik tidak dapat dipisahkan dari upaya diplomasi yang sudah dirancang.

Sementara itu, panggung diplomasi internasional merupakan salah satu upaya dan taktik dalam menentukan mandala atau arena peperangan alternatif. Dengan kata lain, langkah dan medan diplomasi internasional menjadi salah satu pilihan cerdas dalam

<sup>7</sup> Carl von Clausewitz, *op.cit.*, hlm. 2. Lihat juga Michael Howard and Peter Paret (ed.), *On War*, New Jersey: Princeton University Press, 1989, p. 78.

<sup>8</sup> Lihat pula Peter Paret, *Understanding War: Essay on Clausewitz and the History of Military Power*. New Jersey: Princeton University Press, 1992, p. 47.

memperluas mandala perang bagi para pelaksana *proxy war* dengan rancangan perang asimetris mereka, sehingga pentingnya diplomasi internasional serta kampanye dan propaganda politik internasional untuk memperoleh dukungan banyak negara atas kepentingan kelompok dan entitas yang lebih luas, yang setara dengan negara, diterima secara luas. Ia menjadi penting perannya sejalan dengan berkembangnya pemahaman atas pentingnya *soft power* sebagai alternatif atas penggunaan *hard power*, berupa penggunaan kekuatan militer atau senjata. Demikian pula, dalam sasarannya, melalui arena diplomasi internasional, diharapkan dunia internasional memberikan respons dukungan, minimal empati, atas perjuangan separatisme Papua.

Perang asimetris dan *proxy war* yang ditimbulkannya, memperlihatkan pelaku yang beragam, baik yang dikenal sebagai aktor negara selama ini, maupun yang dapat dikategorikan sebagai aktor non-negara, yang semakin banyak diakui perannya, yang sama signifikannya akhir-akhir ini. Dalam studi strategis dan keamanan dalam makna luas, sebagaimana studi hubungan internasional, kehadiran aktor non-negara memperoleh tempat yang lebih spesifik untuk dianalisis. Dalam karya Buzan, Terrif, Croft dan lain-lain, perspektif non-tradisional dan tradisional dari ancaman keamanan dan peran aktor non-negara dalam memberikan ancaman dibahas sama pentingnya.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Waktu dan Tempat

Penelitian lapangan dilakukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk Provinsi Papua penelitian lapangan dilakukan di Kota Jayapura dan Kabupaten Wamena, sedangkan Provinsi Papua Barat, penelitian lapangan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari. Penelitian lapangan di Provinsi Papua dilakukan pada 25 Juni-1 Juli 2014,

sedangkan di Provinsi Papua Barat pada 10-16 Agustus 2014. Pengumpulan data sekunder (tertulis) dan wawancara awal dengan narasumber di Jakarta sudah mulai berjalan sejak Maret 2014.

### 2. Bahan/Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data awal dilakukan melalui studi kepustakaan, yang dilanjutkan dengan penggalian data dengan teknik wawancara mendalam. Sebelum ke lapangan, untuk perbaikan dan penajaman proposal dan rancangan penelitian ini, dilakukan diskusi secara terarah dan spesifik melalui mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD). Di lapangan, untuk menambah dan mempertajam data yang dikumpulkan, dilakukan FGD dengan pemangku kepentingan yang berbeda, melibatkan LSM dan akademisi.

Narasumber utama dalam penelitian lapangan ini adalah pihak keamanan (TNI dan Kepolisian), dan aparat pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dan provinsi. Dari kalangan TNI, yang diwawancarai adalah dari pihak Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Cendrawasih dan Komando Resort Militer (Korem) Jayapura. Sedangkan dari aparat kepolisian adalah pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jayapura dan Kepolisian Resort (Polres) Wamena, serta Polres Manokwari. Sedangkan dari kalangan LSM dan akademisi, masing-masing yang diwawancarai adalah pegiat LSM Forum Kerja Sama (Foker) LSM Papua dan Jaringan LSM Manokwari. Narasumber dalam penelitian ini juga para pakar hubungan internasional, ahli Papua, dan orang Papua yang mendukung diplomasi internasional kemerdekaan Papua.

### 3. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dikompilasi dan dipilah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Reduksi data dilakukan, sehingga penggunaan metode kualitatif memberikan hasil analisis yang tajam untuk

menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Data awal dan studi kepustakaan (sekunder) di-*cross-check* dengan yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam, dan dikombinasikan penggunaannya untuk analisis masalah.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Internasionalisasi Gerakan

Internasionalisasi gerakan separatis Papua semakin dimotivasi oleh belum berhasilnya perjuangan bersenjata di lapangan untuk mencapai tujuan Papua merdeka selama 45 tahun, dihitung dari tahun 1969. Sebaliknya, semakin banyaknya korban berjatuh di kalangan gerakan separatis dan penduduk sipil pendukung atau simpatisan gerakan separatis Papua dalam perlawanan fisik bersenjata meningkatkan upaya perjuangan di jalur non-militer atau arena diplomasi. Tercatat, dalam kurun waktu tiga tahun saja, yakni 2009-2012, 67 orang tewas, baik aparat maupun warga biasa.<sup>9</sup>

Realitas juga memperlihatkan aktor diplomasi gerakan separatisme Papua beragam, melibatkan individu, kelompok, organisasi, LSM, negara dan kumpulan negara, serta organisasi regional dan multilateral. Berikut ini diungkap dan dibahas mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, aktif atau tidak aktif, di arena diplomasi internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua.

#### 1. Aktor Non-Negara

Para aktor individu yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua di forum internasional selama ini adalah politisi dan pelarian seperti Theys Eluay, Socrates Sofyan Nyoman, Herman Wanggai, dan Benny Wenda. Ini belum termasuk mereka yang telah memperoleh suaka untuk menetap atau pun telah menjadi warga negara di mana mereka

tinggal, terutama di Belanda dan negara Eropa lainnya, serta Australia dan AS. Juga muncul pendatang baru dari kalangan generasi yang lebih muda seperti aktivis pemuda dan mantan jurnalis *Kompas*, Octavianus Motte (Otto), yang aktif berkampanye melalui jalur akademik, melalui kegiatan di forum ilmiah di universitas dan media sosial.

Aktor non-negara yang juga ditengarai terlibat adalah aktivis dan pemuka (pendeta) gereja, baik asal Papua maupun asing. Nama Pendeta Socrates Sofyan Nyoman sudah lama diidentifikasi oleh aparat keamanan, baik Polri maupun TNI sebagai kalangan gereja yang ekstrim dan sangat berbeda pandangan dengan pemerintah dalam menyikapi gerakan separatisme Papua. Kalangan gereja termasuk para donatur asal manca negara yang diwaspadai aktivitas mereka cenderung *bias* mendukung pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah dalam menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM dan tuntutan pengusutannya, serta kemiskinan, keterbelakangan, dan terjadinya perubahan drastis struktur dan terganggunya keseimbangan demografis Papua. Sikap asertif donatur asing dan misionaris gereja terhadap pemerintah dalam menangani masalah separatisme sering dikatakan oleh aparat sebagai hal yang mengganggu karena mereka sering mengangkat isu *ethnic cleansing* di Papua yang tidak berdasar.<sup>10</sup>

Di luar aktor individu, aktor non-negara di dalam negeri yang diidentifikasi Kemlu RI adalah LSM seperti Foreri, Forum Kerja Sama (Foker), Dewan Adat Papua (DAP), Organisasi Pribumi Papua Barat (OPPB), dan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPPB) dengan presidennya, Forkorus.<sup>11</sup> MRP dan DPRP, serta LSM seperti *Akar Foundation* dan *National Papua Solidarity* (Napas)<sup>12</sup> juga dicurigai pemerintah atas sikapnya yang seringkali dinilai

<sup>9</sup> "Menunggu Kiprah Prajurit-prajurit Profesional untuk Papua," *Kompas*, 12 Mei 2104.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kapolres Wamena, Kombes Adolf Bey tanggal 29 Juni 2014 di Kota Wamena.

<sup>11</sup> "Kampanye Internasional Gerakan Separatis Papua," *loc.cit.* Lihat juga, "Andy Ayamiseba: WPNCL Tidak Mewakili NFRPB," *Cahaya Papua*, 11 Agustus 2014, hlm. 7.

<sup>12</sup> "Indonesia Diminta bebaskan Tapol Papua," *Suara Pembaruan*, 2 April 2014, hlm. A 14.

ambivalen, memperlihatkan dukungan pada aspirasi dan gerakan separatisme Papua. Sedangkan LSM asing yang aktif terlibat kampanye internasional di luar negeri adalah LSM seperti *Free West Papua Campaign* (FWPC), *International Parliamentarians for West Papua* (IPWP), *West Papua Interest Association* (WPIA), *West Papua Liberation Organization* (WPLO), *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL), serta *Survival International*. Ada pun FWPC telah mempunyai kantor perwakilan luar negeri sejak 2 bulan lalu, sebelum penelitian lapangan ini dijalankan, di Darwin, Australia,<sup>13</sup> wilayah terdekat dari Merauke. Selain itu, terdapat beberapa lagi yang masih bersifat organisasi sempalan atau jejaringnya.<sup>14</sup>

WPNCL sendiri mempunyai sekretariat internasional di Porty Villa, Vanuatu. Ia merupakan organisasi payung yang mewakili 28 gerakan separatis Papua. Andy Ayamiseba adalah salah satu tokohnya. Agenda politiknya melakukan lobi untuk memperoleh dukungan regional dan internasional bagi pelaksanaan sebuah referendum baru di Papua sesuai dengan aturan internasional. Andy menggunakan istilah "referendum murni" untuk membedakannya dengan Pepera. Ia mengklaim *road map* menuju "referendum murni" itu didukung penuh oleh Vanuatu.<sup>15</sup> Untuk mencapai tujuan politiknya tersebut, WPNCL telah mendaftarkan keanggotaannya dalam MSG.

Aktor non-negara asing dapat terlibat dalam kegiatan intervensi asing terhadap hubungan pusat dan daerah yang terus memburuk dan berimplikasi pada muncul dan menguatnya aspirasi separatisme. Mereka yang dapat terjerumus terlibat terdiri dari lembaga-lembaga agama dan pegiatnya (para misionaris) dan aktivis LSM yang menerima dana kegiatan dan aspirasinya cenderung pro-(kepentingan)

negara donor, terutama jika terprovokasi oleh alasan adanya indikasi pelanggaran HAM berat yang kontinyu dan tidak berusaha dihentikan dan direspons secara terbuka dan adil oleh pemerintah nasional, terutama untuk para korbannya. Juga, untuk alasan adanya indikasi genocida terhadap orang asli (pribumi) Papua akibat realitas perubahan keseimbangan demografis yang diganggu (dirusak) secara sistematis, atau terencana, didukung pemerintah pusat, dengan kebijakan-kebijakannya.<sup>16</sup> Penilaian seperti ini juga tercermin dalam penjelasan para pegiat LSM di Jaringan Advokasi LSM Papua Barat, LP3BH, di Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat.<sup>17</sup>

Selain itu, peran media asing dan lokal seperti *Cendrawasih Pos* dinilai turut memanasakan situasi dan berpihak pada aspirasi para simpatisan dan pengikut gerakan separatisme (kemerdekaan).<sup>18</sup> Jurnalis asing berperan signifikan dalam mendiseminasikan (menyebarkan) kampanye internasional gerakan separatis Papua secara langsung dan efektif. Itulah sebabnya, pengawasan terhadap peliputan oleh asing sangat ketat, dan kesempatan wartawan asing untuk bisa melakukan peliputan sangat sulit. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas bersenjata OPM, yang oleh aparat keamanan disebut "Kelompok Sipil Bersenjata", sebutan yang menjauhkan para pengikut gerakan separatis dari kepentingan dan tujuan politik mereka, terdapat wartawan asing yang tertangkap di lapangan, yang diduga tengah melakukan tugas jurnalistiknya dengan menggunakan visa turis.

Ini kasus yang terjadi dengan Thomas Charles Dandies dan Loise Marie Valentine Burrot, jurnalis asal Prancis. Ia tertangkap bersama 3 orang anggota OPM di sebuah hotel di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua pada 6 Agustus 2014, hanya sekitar 2 minggu berselang setelah penelitian lapangan

<sup>13</sup> Wawancara dengan Danlanud, Letkol (Penerbang) Didik Kristiyanto, dan Asisten Intelijen Lanud, Iwang Galih L, Merauke tanggal 21 Mei 2014 di Merauke.

<sup>14</sup> "Kampanye Internasional Gerakan Separatis Papua," *loc.cit.*

<sup>15</sup> "Andy Ayamiseba: WPNCL Tidak Mewakili NFRPB," *Cahaya Papua*, 11 Agustus 2014, *loc.cit.*

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kasrem 172/PJY, Letkol Rano Tilaar tanggal 26 Juni 2014 di Kota Jayapura.

<sup>17</sup> FGD dengan aktivis Jaringan Advokasi LSM Papua Barat, LP3BH di Kota Manokwari tanggal 12 Agustus 2014.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Pangdam XVII Cendrawasih tanggal 27 Juni 2014 di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

dilakukan. Ia diduga sedang melakukan peliputan ilegal, dengan perantara jurnalis Australia, dan tengah mendokumentasikan perjuangan OPM, Purom Wenda dan Enden Wamimbo di Lanny Jaya untuk pembentukan Negara Federal Republik Papua Barat.<sup>19</sup> Mereka ditangkap karena telah menyalahgunakan visa kunjungannya sebagai turis, dan terkuak masing-masing identitasnya tidak lagi merupakan jurnalis Arte TV Prancis dan diplomat Prancis. Dandies dan Burrot. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut pihak Polda Papua diketahui bahwa mereka telah bertemu dengan Forkerus Yoboisembut, tokoh NRPFB, Ketua Dewan Adat Papua (DAP), dan mantan terpidana kasus makar yang telah dipenjarakan tahun 2011 dan baru saja dibebaskan pada 21 Juli 2014.<sup>20</sup>

Sebaliknya, bagi OPM, khususnya Purom Wenda dan Enden Wamimbo, mantan PNS yang menjadi aktivis separatis tidak lama setelah pemekaran Kabupaten Lanny Jaya setelah tidak memperoleh posisi yang lebih baik, kehadiran jurnalis asing bermakna lain. Mereka tampaknya telah mengundang kehadiran para jurnalis asing itu untuk membuat peliputan "perjuangan bersenjata" OPM melawan aparat keamanan Indonesia, yakni polisi dan TNI, dalam memerdekakan Papua, untuk mencari perhatian internasional. Untungnya, setelah beberapa aksi penembakan terhadap polisi dan guru akhir-akhir ini, TNI tidak terpancing untuk bersikap agresif. TNI selalu dapat menahan diri, hanya berada di belakang polisi dalam merespons aksi-aksi bersenjata OPM berikutnya.

## 2. Aktor Negara

Aktor negara terkait dengan internasionalisasi gerakan separatis Papua beragam, mulai dari negara kecil sampai besar, mulai negara tetangga, negara-negara lain di kawasan terdekat, hingga negara besar

(adidaya) di luar kawasan. Yang diidentifikasi sebagai aktor negara ini ada yang memiliki hubungan historis secara langsung dan ada yang tidak. Karena beragamnya aktor negara yang terlibat, dipilih beberapa aktor negara yang eksistensinya cukup signifikan terkait aktivitas gerakan separatis Papua.

### a. Fiji, Vanuatu, dan PNG

Pertama-tama harus dibahas peran Fiji dan Vanuatu, dua negara di Pasifik Selatan, rumpun Ras Melanesia, yang juga anggota tokoh (pendiri) MSG, yang sebelumnya sangat vokal dalam menyampaikan sikap mereka yang asertif terhadap kebijakan pemerintah Indonesia di Papua. Aktivis yang mendukung gerakan separatis Papua adalah musikus Fiji, Seru Serevi. Ia telah meluncurkan album musiknya "*Let the Morning Star Rise*," di kantor *Fiji Performing Rights Association* di ibukota Suva pada Maret 2014, untuk mengajak negara-negara di Kepulauan Pasifik mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Langkahnya ini terpengaruh oleh kampanye internasional kelompok pemusik asal Papua, *The Black Brothers*, yang belakangan juga mendukung gerakan separatis Papua.

Sementara itu, Vanuatu, sebagai entitas negara, secara resmi dan sangat vokal telah mendukung kampanye internasional untuk kemerdekaan Papua ketika PM-nya adalah Moana Kalosil Carcasses. Ia telah mengesahkan kebijakan Indonesia yang dinilainya sebagai kolonialisme dan neo-imperialisme di Papua, dan telah meminta pada PBB agar menunjuk Utusan Khusus untuk menyelidiki isu pelanggaran HAM di Papua Barat pada Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 28 September 2013. Kecaman dan tuduhan serupa ia jalankan kembali dalam Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada 4 Maret 2014. Ia bahkan meminta agar Dewan HAM PBB, LSM dan jurnalis internasional diberi akses untuk berkunjung ke Papua. Penggantinya, Joe Natuman, juga pro-Papua merdeka, tetapi Menlunya adalah seorang yang pro-Indonesia, yang telah membantu Indonesia sebagai bagian

<sup>19</sup> "Polisi Tangkap Jurnalis Asing," *Kompas*, 8 Agustus 2014, hlm. 5. Lihat juga *Kompas*, 9 Agustus 2014.

<sup>20</sup> "Liputan Dua Wartawan Prancis Ancam NKRI," *Manokwari Express*, 13 Agustus 2014, hlm. 2; "Liputan Dua Wartawan Prancis Ancam NKRI," *Media Papua*, 13 Agustus 2014, hlm. 4.

dari MSG dan memperoleh status *observer* dalam KTT MSG di Suva, Fiji, pada Maret 2011.

Kemudian perlu diungkap sikap PNG, negara tetangga terdekat Indonesia yang memiliki perbatasan darat dan laut dengan Papua. Ada pun sikap Pemerintah PNG secara sepihak, bukan dalam kerangka MSG, yang tampak kurang mendukung posisi dan kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap gerakan separatisme Papua belakangan ini patut dipertanyakan, sebab dari basis-basis mereka di sepanjang perbatasan Indonesia (Papua)-PNG, gerakan separatisme semakin mudah dan sering melancarkan serangan bersenjata terhadap pos-pos lintas batas dan aparat keamanan Indonesia.<sup>21</sup>

Selama ini sikap aparat keamanan negara tetangga PNG terhadap aksi-aksi OPM di lapangan tidak jelas. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap OPM, karena tidak memiliki kepentingan dan cenderung membiarkan aktivitas OPM di perbatasan, terutama terhadap mereka yang sering melakukan agitasi dan serangan bersenjata secara mendadak terhadap orang dan kantor-kantor dinas Indonesia. Aparat keamanan PNG juga sudah mengetahui aktivis OPM tinggal di wilayah PNG, di perbatasan dengan wilayah Indonesia, bersama dengan saudara-saudara mereka yang berasal atau warga negara PNG. Sikap aparat keamanan PNG terhadap para pengikut dan aktor OPM serta kegiatan-kegiatan mereka seperti apatis dan melakukan pembiaran. Ini ada hubungannya dengan kondisi tertib sosial dan politik serta situasi domestik PNG yang (masih) tidak stabil dalam waktu berkepanjangan. Selain itu, karena tidak adanya pembuatan Nota Kesalingsepahaman dan kerja sama antara kedua negara untuk mengatasi OPM dan kegiatan bersenjata mereka yang merugikan kedua negara.<sup>22</sup> Demikian pula, tidak ada pos perbatasan bersama, selain di Skouw-Wutung, dengan kehadiran aparat

keamanan kedua negara untuk mengawasi orang-orang yang melakukan kegiatan lintas batas di pedalaman Papua, terutama sepanjang wilayah selatan seperti Merauke.<sup>23</sup>

Aksi-aksi kekerasan dan penembakan terhadap aparat keamanan Indonesia dan TNI terus dilakukan OPM dari wilayah PNG. Dengan perkembangan ini, Pemerintah Indonesia menilai Pemerintah PNG tidak melaksanakan kesepakatan bersama untuk menjaga perdamaian di perbatasan kedua negara di Skouw Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Karena itulah, Pangdam XVII/Cendrawasih, Mayjen Christian Zebua, memberikan pernyataan sikap kepada pihak PNG agar memperhatikan kembali kesepakatan bersama kedua negara untuk menghentikan kegiatan, terutama aksi-aksi bersenjata, OPM, yang selama ini melakukan aksi-aksinya dari PNG.<sup>24</sup>

#### **b. Australia**

Sebagaimana terdapat dalam laporan Kedutaan Besar RI (KBRI) di luar negeri, Australia adalah salah satu negara asing dengan banyak pelarian OPM yang aktif menjalankan kampanye separatisnya, termasuk Herman Wanggai, yang bersama 45 orang Papua lainnya melarikan diri ke Australia pada tahun 2005. Hal ini logis sebab Australia merupakan negara tetangga terdekat Indonesia, yang letaknya secara geografis sangat berdekatan dengan Provinsi Papua, terutama dari Darwin. Sikap negara itu dalam merespons gerakan separatisme Papua masih konstruktif mendukung Indonesia, dan tidak menunjukkan dukungannya.

Bantuan luar negeri yang mengalir dari Australia ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat cukup besar dan dalam periode yang cukup lama, karena kondisi realistis provinsi itu yang masih memerlukan bantuan. Selama ini bantuan luar negeri yang menjadi bagian dari strategi kebijakan luar negeri Australia banyak diprioritaskan dan disalurkan ke wilayah-

<sup>21</sup> Lihat, "Teror Terjadi Lagi di Perbatasan RI-Papua Niugini," *Kompas*, 19 April 2014, hlm. 21.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Danlanud, Letkol (Penerbang) Didik Kristiyanto, dan Asisten Intelijen Lanud, Iwang Galih L, tanggal 21 Mei 2014 di Merauke.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Dandim 1707 Merauke, Letkol. Dedy Hardhono tanggal 21 Mei 2014 di Merauke.

<sup>24</sup> "PNG Dinilai Tak Laksanakan Kesepakatan," *Kompas*, 9 Juni 2014, hlm. 22.

wilayah Indonesia Bagian Timur. Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kondisi keterbelakangan selama ini merupakan wilayah yang banyak menerima bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri tersebut menjadi bagian yang terintegrasi dalam APBN setiap tahun yang diterima mereka, sehingga karena begitu besar jumlahnya, eksistensinya sangat mempengaruhi kelangsungan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan penduduk di wilayah kedua provinsi. Tidak heran, muncul kekuatiran bahwa arah perkembangan kebijakan dan pembangunan di sana rawan diintervensi oleh kepentingan negara tetangga terdekat Indonesia yang memiliki perbatasan laut dengan Provinsi Papua.

Selanjutnya sejak tahun 1989 Pemerintah Australia telah menyalurkan beasiswa pasca-sarjana kepada lebih dari 50 orang mahasiswa asal Provinsi Papua untuk belajar di Australia.<sup>25</sup> Belum lama ini 17 calon kepala sekolah dari 5 kabupaten, termasuk Biak, juga dikirim ke Australia. Hasil dari program bantuan beasiswa Pemerintah Australia, sudah ada 143 alumni dari program pendek dan 7 alumni program panjang yang kembali ke Papua. Pemerintah Australia sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp38 miliar untuk pengembangan pendidikan di bumi Papua.<sup>26</sup> Bantuan-bantuan dasar ini dapat menjadi bumerang bagi Pemerintah Indonesia, jika tidak dapat memperbaiki kinerjanya dalam jangka menengah dan panjang, sebab memang sudah menjadi kewajiban pemerintah nasional untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduknya.

Dalam kasus kampanye internasional OPM melalui pengikutnya yang telah menjadi WN Australia yang akan melakukan kampanye menggunakan kapal *yacht* "Pog Mo Hon," dengan memakai nama "Freedom Flotilla," meniru apa yang telah dilakukan oleh pengikut

dan simpatisan perjuangan Palestina, Pemerintah Australia tidak mendukungnya. Itulah sebabnya, perjalanan dan aksi gerakan separatis Papua di balik kampanye perlindungan HAM atas orang-orang pribumi Papua dengan pelayaran kapal "Freedom Flotilla" pada Agustus 2103, kandas, tidak berhasil melanjutkan perjalanannya memasuki perairan Indonesia melalui perbatasan laut Australia-Merauke.

### c. Inggris dan AS

Inggris akhir-akhir ini menjadi pilihan para aktivis gerakan separatis Papua karena pengaruh politiknya yang luas di Eropa, termasuk Uni Eropa. Namun Pemerintah Inggris sendiri mengakui kedaulatan Indonesia dan tidak pernah menentang posisi dan kebijakan Pemerintah Indonesia atas Papua. Seperti halnya di Australia yang merupakan anggota Persemakmurnya, aktivitas mendukung gerakan separatisme Papua dilakukan oleh para aktivis OPM yang melarikan diri.

Aktivitas kampanye Papua merdeka dan menentang Pemerintah Indonesia datang dari kalangan LSM, seperti *Free West Papua Campaign* (FWPC), yang menjadikan Inggris sebagai pusat gerakannya sejak tahun 2004. Benny Wenda, eks-pelarian yang telah menjadi warga negara Inggris, adalah aktivis gerakan separatis Papua yang membuka kantor perwakilan FWPC di Oxford pada 8 Mei 2013, menambah kantor yang sudah ada di Den Haag, Belanda, Port Moresby, PNG, dan Perth, Australia. Dengan segala upaya akhirnya Wenda dapat mengibarkan bendera Bintang Kejora di Kantor Dewan Kota Oxford setiap tanggal 1 Desember setiap tahun, sekali pun itu tidak merepresentasikan sikap Pemerintah Inggris.<sup>27</sup> Karena aktivitas dan berbagai lobi politiknya pula, Wenda berhasil menginisiasi pendirian *International Parliamentarians for West Papua* (IPWP) di London pada 15 Oktober 2008. Melalui penggunaan media sosial *twitter*, dan juga *website* <http://freewestpapua.org> dan

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> "17 Calon Kepala Sekolah Dikirim ke Australia," *Tabura Pos*, 5 Agustus 2014, hlm. 4; "Pemerintah Australia Siapkan Rp38 Miliar untuk Pengembangan Pendidikan di Papua," *Tabura Pos*, 5 Agustus 2014, hlm. 4.

<sup>27</sup> "Kampanye Internasional Gerakan Separatis Papua," makalah presentasi, Jakarta: Kementerian Luar Negeri, 2014, hlm. 17-18.

<http://bennywenda.org>, Wenda meng-update secara rutin perkembangan eskalasi kekerasan di Papua. Ia juga aktif melakukan kampanye dengan mengirim tulisan ke media internasional yang progresif, seperti *The Guardian* pada 28 April 2014, menyambut pembukaan kantor perwakilan FWPC di Perth, Australia.

Dukungan terhadap kegiatan Wenda dan gerakan separatis Papua datang dari beberapa individu anggota parlemen Inggris, terutama *House of Lord*, dan aktivis lama LSM anti-Pemerintah Indonesia seperti Carmel Budiarto. Yang patut diperhatikan dari perkembangan kampanye gerakan separatis Papua di Inggris adalah aktivitas dan pengaruh IPWP yang terus menggalang dukungan dari para anggota parlemen berbagai negara. IPWP telah berhasil membuka kantor perwakilan di Parlemen Eropa di Brussels pada Januari 2009, di PNG pada November 2009, di Skotlandia pada September 2010, di Australia pada Maret 2012, di Guyana pada Desember 2012, dan di Vanuatu pada Februari 2013.

Ada pun sikap Pemerintah AS selama ini sangat mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyikapi masalah separatisme Papua, dengan terus mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan. Mereka mempunyai kepentingan khusus dengan keberadaan PT Freeport yang sangat menguntungkan dan diandalkan dalam bisnisnya dengan Pemerintah Indonesia. Hal ini tampak dari aktivitas Dubes barunya tidak lama setelah tiba di Indonesia. Pada 8-13 Juni 2014, Robert O. Blake, Jr., melakukan kunjungan ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kunjungan ini merupakan bagian dari kunjungan kelilingnya ke banyak daerah di Indonesia yang menandai kerja sama yang semakin meningkat antara Pemerintah AS dan Indonesia, selain memperlihatkan perhatian yang besar pada pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil di Papua. Dalam kesempatan ini Pemerintah AS sekali lagi

menyatakan pengakuannya terhadap integritas teritorial Indonesia atas Papua.<sup>28</sup>

Sikap yang berbeda muncul dari perorangan politisi, anggota DPR/Senat, mantan pejabat pemerintah, akademisi, dan aktivis LSM, termasuk orang asal Papua yang meminta suaka di sana, sambil terus menjalankan kampanye separatisme mereka. Untuk LSM, yang menjalankan kampanye separatisme Papua antara lain ETAN (*East Timor and Indonesia Action Network*), yang kini mengalihkan kegiatannya untuk mendukung kemerdekaan Papua setelah berhasil mendukung kampanye kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Selain itu ada *Moana Nui Action Alliance-California* (MNAAC-CA), yang berbasis di Hawaii dan California, yang tujuannya sangat politis, serta *Human Rights Watch* (HRW) dan Amnesti Internasional (AI) yang fokus pada pelanggaran HAM. Sedangkan secara individual, sejak lama anggota Komisi Luar Negeri DPR AS untuk Sub-Komisi Asia Pasifik dari Partai Republik, Eni Faleomavaega, aktif mendukung gerakan separatisme, karena solidaritas Melanesia. Ia pernah berupaya mengunjungi Papua, namun gagal memperoleh izin, karena aktivitasnya dikhawatirkan akan membawa dampak negatif lebih luas, dimanfaatkan gerakan separatis untuk kepentingan menyudutkan Indonesia.

### 3. Aktor Organisasi Regional

#### a. *Melanesia Spearhead Group* (MSG)

Pendirian MSG merupakan hasil dari pertemuan yang diadakan di Goroka, Papua New Guinea (PNG) pada 17 Juli 1986 oleh kepala-kepala pemerintahan PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan FLNKS. Sekretariat MSG ditetapkan di Port Vila, Vanuatu, negara Pasifik Selatan yang sejak lama diketahui paling mendukung gerakan separatis Papua. Selanjutnya penandatanganan "Persetujuan MSG" (*MSG Agreement*) pada 14 Maret 1988 oleh negara-negara Pasifik Selatan, yakni

<sup>28</sup> Elly Burhaini Faizal and Nethy Dhrama Somba, "US ambassador visits Papua provinces," *The Jakarta Post*, June 16, 2014, p. 2.

Vanuatu, Fiji, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, dan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (*Front de Liberation Nationale Kanak Socialiste* –FLNKS) telah menandai perkembangan historis penting MSG sebagai sebuah organisasi regional di Pasifik Selatan. Pada tanggal tersebut, PM PNG, Paias Wingti, PM Kepulauan Solomon Ezekiel Alebua, dan PM Vanuatu, Walter Lini, menandatangani 6 butir "Prinsip-prinsip yang disepakati mengenai Kerja Sama di antara Negara-negara Merdeka di Melanesia."<sup>29</sup>

#### b. Uni Eropa/Parlemen Eropa

Dalam Sidang Kelompok Kerja *Universal Periodic Review* (UPR) Dewan HAM PBB pada 23 Mei 2013, Indonesia kembali mendapat sorotan tajam dari 14 negara maju, termasuk negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Italia, terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM di Papua.<sup>30</sup> Sedangkan pada 26 Maret 2014, 16 anggota parlemen UE telah mengirimkan surat ke *High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy*, Baroness Chatherine Ashton, untuk menindaklanjuti masalah pelanggaran HAM di Papua, untuk merespons rapat dengar pendapat (*hearing*) Parlemen Eropa (PE) pada 23 Januari 2014 dan hasil pemungutan suara pada 26 Februari 2014.

Dalam pengantar pandangan PE diungkapkan bahwa sejak integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia pada 1 Mei 1963 telah banyak terjadi kekerasan, terutama banyak orang Papua terbunuh akibat operasi militer yang dilakukan aparat keamanan Indonesia pada 1960-1980. PE mengungkapkan lebih jauh adanya laporan gereja-gereja dan organisasi HAM di Papua tentang berbagai praktek pembunuhan kilat, penganiayaan, penahanan paksa, dan pembantaian, serta harapan rakyat Papua mengenai kebebasan berpendapat, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang

memuaskan. Dalam surat PE juga dilaporkan adanya sekitar 25 aktivis dan warga masyarakat yang terbunuh dalam periode Oktober 2011 hingga Maret 2013, di samping terdapat 74 tahanan politik pada awal tahun 2014.<sup>31</sup>

#### B. Respons Pemerintah

Terhadap peran negara asing, jika kondisi di Papua tidak dapat dikontrol pemerintah pusat, perspektif aparat TNI di Papua melihat adanya keuntungan yang dinikmati negara asing. Begitu pula, kondisi Papua yang tidak jauh lebih maju akan terus menguntungkan kepentingan negara asing. Hal ini karena dengan kondisi demikian tidak akan banyak muncul tuntutan perbaikan yang dapat berdampak pada munculnya tuntutan-tuntutan (baru) peningkatan *share* bagi peningkatan kesejahteraan penduduk pribumi Papua dan wilayah mereka, termasuk dari pembagian hasil eksploitasi SDA, pajak, penempatan pegawai asal penduduk asli Papua, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Pembangunan Armada Timur dengan pangkalan di Sorong, Papua Barat, juga dalam rangka merespons separatisme Papua sebagai ancaman utama Indonesia dewasa ini dan ke depan. Demikian juga dengan inisiatif pembangunan Kogab dan Kowilhan.<sup>33</sup> Kalangan Angkatan Udara, melalui Lanud Merauke, turut berperan dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penangkalan masuknya para pengikut dan simpatisan OPM di Australia, dengan kampanye internasional mereka menggunakan kapal "Freedom Flotilla". Di matra udara, Lanud mengerahkan pesawat Boeing untuk memantau, sekaligus memberikan efek penangkalan bagi (misi) pelayaran internasional kapal tersebut, yang direncanakan akan berangkat dari pelabuhan

<sup>29</sup> "MSG Hadlines," Sekretariat MSG, <http://www.msgsec.info/index.php/home/86-cherising-our-unique-history>, diakses 24 Februari 2014.

<sup>30</sup> Freddy Numberi, "UE dan Pelanggaran HAM di Papua," *Kompas*, 7 Mei 2014, hlm. 7.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kasrem 172/PJY, Letkol Rano Tilaar tanggal 26 Juni 2014 di Kota Jayapura; wawancara dengan Pangdam XVII Cendrawasih tanggal 27 Juni 2014 di Kota Jayapura.

<sup>33</sup> Toto Permanto, dalam FGD di P3DI, Jakarta, 2 April 2014. Lihat juga, Toto Permanto, "Kebijakan pada Aspek Pertahanan dalam Pengelolaan Keamanan Maritim di Kawasan," makalah dipresentasikan di P3DI, tanggal 2 April 2014. Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2014.

Darwin menuju ke Merauke dengan singgah lebih dulu di Pulau Daru, PNG.

Upaya Lanud dengan operasi udara menggelar pesawat Boeing itu berhasil mengurungkan niat OPM di Australia untuk melanjutkan kampanye internasionalnya ke wilayah Papua, Indonesia. "Operasi udara" ini berjalan selama 2 minggu, dengan membuat pesawat Sukhoi siap sedia (*stand by*) jika diperlukan untuk beroperasi. Karena itu, diperlukan perbaikan kondisi daya dukung Lanud Merauke, terutama avron-nya, yang masih menggunakan bandara Mopah. Ini penting untuk memberikan fasilitas *stand by* bagi pesawat-pesawat Sukhoi dan sejenisnya untuk tugas yang lebih berat tetapi bisa diandalkan, untuk menjaga wilayah NKRI dari ancaman. Secara khusus, bandara dan aparat pendukungnya harus dapat menyediakan pesawat dan mendukung tugas-tugas operasional untuk operasi *anti-insurgency* (*counter-insurgency*) atau anti-gerilya di hutan-hutan.<sup>34</sup>

Pihak kepolisian, yang bertanggung jawab langsung atas masalah keamanan masyarakat, termasuk atas ancaman kelompok pemberontak bersenjata (*separatisme*), yakni pihak Polda Provinsi Papua, belum lama ini berhasil menangkap para aktor lapangan yang tengah berupaya memasukkan senjata ke Papua dan menyalurkannya kepada kelompok pemberontak bersenjata OPM. Setelah Polda Provinsi Papua pada akhir Juni 2014 berhasil menggagalkan pengiriman senjata, amunisi, dan uang dari PNG, Polda Provinsi Papua Barat juga pada 1 Juli 2014 kembali berhasil menangkap 3 orang yang berupaya memasukkan senjata untuk OPM dari Tobelo, Maluku Utara.<sup>35</sup> Simon Kararbo, Manase Wesara, dan Roger Koloba berhasil ditangkap di Sorong, dengan senjata berupa 1 pucuk senjata jenis SS1,1 pucuk senjata jenis *jungle*, dan 1 pucuk jenis FN 45, serta 123 butir amunisi.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Danlanud, Letkol (Penerbang) Didik Kristiyanto, dan Asisten Intelijen Lanud, Iwang Galih L tanggal 21 Mei 2014 di Merauke.

<sup>35</sup> Lihat, "Asing Suplai Senjata: Dukung Perjuangan Organisasi Papua Merdeka," *Kompas*, 4 Juli 2014, hlm. 15.

Selain dari PNG dan Maluku, Kapolda Papua, Irjen Tito Karnavian, dalam wawancara menegaskan adanya aliran atau pasokan senjata api dan amunisi yang dibawa para aktor non-negara (*individual*) dari Filipina bagian selatan.<sup>36</sup> Dijelaskannya, dalam 3 bulan terakhir, pihaknya berhasil mengungkap 4 kasus penjualan senjata ke wilayah Papua, termasuk yang berasal dari Filipina Selatan yang dibawa untuk kelompok pemberontak separatis.<sup>37</sup> Yang berasal dari Filipina Selatan adalah senjata-senjata militer standar yang digunakan dalam konflik separatis di sana. Jalur laut yang terbuka luas dan sulit diawasi jalan-jalan tikusnya, tidak hanya melalui pelabuhan Sorong<sup>38</sup> dan Kaimana, telah membuat kawasan perairan Papua rawan terhadap masuknya senjata-senjata. Sebagaimana dijelaskan, para aktor non-negara itu memiliki keterkaitan dengan jaringan pemberontak separatis Papua dan memperoleh keuntungan atau memiliki motif bisnis, melalui kegiatannya mencari dan memasukkan senjata.

Dalam kenyataan, sepanjang September 2014, tidak terjadi kegiatan yang menyudutkan Indonesia terkait dengan kegiatan MSG di kawasan. Bahkan, dalam kunjungan ke Indonesia, dari materi yang dbicarakan dalam pertemuan tidak ada yang khusus menyudutkan dan merugikan posisi Indonesia. Isi *website* MSG juga tidak bersifat ofensif atas kepentingan Indonesia. Kenyataannya, kehadiran delegasi Indonesia dalam fora MSG turut dapat meredam hasil pertemuan sehingga tidak merugikan kepentingan Indonesia. Langkah diplomat Kemlu yang proaktif berhasil mencegah munculnya kampanye yang merugikan Indonesia dan sebaliknya, menguntungkan gerakan separatis Papua. Pemerintah Indonesia melalui Kemlu berhasil

<sup>36</sup> Wawancara dengan Kapolda Papua, Irjen Tito Karnavian tanggal 30 Juni 2014 di Kota Jayapura.

<sup>37</sup> Lihat kembali, "Asing Suplai Senjata: Dukung Perjuangan Organisasi Papua Merdeka," *Kompas*, 4 Juli 2014, hlm. 15.

<sup>38</sup> Sayangnya, Danlanal Manokwari, yang diwawancarai 12 Agustus 2014 di Kota Manokwari, enggan memberikan informasi yang ia ketahui mengenai masalah ini, apalagi mengomentarnya, karena merasa tidak ada hubungannya dengan tugas dan tidak ada izin dari atasan. Ia menganggap hal yang ditanyakan sangat sensitif dan berisiko dengan tugasnya.

membelokkan misi MSG ke arah kerja sama ekonomi mereka dengan Indonesia daripada forum politik yang mengkritisi kondisi HAM Papua dan kebijakan Pemerintah Indonesia selama ini atas Papua yang dinilai mengabaikan masalah HAM.

Kepedulian Indonesia dan keterlibatannya lebih dalam di kegiatan MSG ditunjukkan dengan menyalurkan bantuan ekonomi ke negara-negara anggota MSG dan mengundang mereka ke tempat-tempat pengembangan kerjasama ekonomi, termasuk Jakarta dan Jayapura. Di Jakarta, mereka diundang dan diberikan akses untuk bertemu dengan Ketua DPR. Itulah sebabnya, akibat penyimpangan misi pencarian fakta MSG ini, perwakilan Vanuatu menarik keterlibatan delegasinya dalam MSG untuk mengunjungi tempat-tempat di Indonesia. Dalam kunjungan mereka ke Indonesia, Delegasi MSG tidak diberikan akses untuk mengunjungi LSM HAM, para korban dan keluarganya, dan tempat-tempat yang pernah menjadi lokasi pelanggaran HAM pada masa lalu, di Papua khususnya. Mereka juga tidak diberi akses untuk mewawancarai para tokoh HAM dan masyarakat untuk menanyakan secara langsung mengenai pelanggaran HAM yang telah terjadi dan dialami.<sup>39</sup>

Langkah lebih progresif telah ditunjukkan oleh Presiden SBY dengan hadir di KTT ke-2 Forum Pembangunan Pulau-pulau Pasifik (*Pacific Islands Development Forum-PIDF*) di Denarau, Fiji, yang diikuti 16 negara-negara anggotanya. Meskipun Indonesia tidak merupakan anggota forum, namun diundang untuk berbicara dalam forum itu sebagai pembicara kunci. Presiden SBY memanfaatkan kesempatan itu untuk mengimplementasikan apa yang ia sebut sebagai kebijakan luar negeri ke segala arah (*all direction foreign policy*). Dengan kebijakan ini, Indonesia sekarang juga memperhatikan Australia dan Selandia Baru di Selatan, dan negara-negara Kepulauan Pasifik di timur Indonesia. Selama ini Indonesia hanya

fokus ke barat, yakni ke Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Manfaat atau kepentingannya memang lebih terarah pada keamanan nasional, terkait dengan upaya mempertahankan integrasi nasional, mengingat selama ini negara-negara Pasifik Selatan telah dimanfaatkan oleh gerakan separatis Papua untuk memperoleh dukungan politik. Sedangkan negara-negara di kawasan itu, sebelum ada pendekatan diplomasi damai Indonesia belum memahami kebijakan Indonesia yang dalam 1 dasa warsa terakhir sudah berubah.

Kemlu juga meluncurkan diplomasi budaya Melanesia melalui kuliner, selain mendorong Indonesia untuk bergabung dan aktif terlibat lebih mendalam di MSG. Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan, selain karena faktor kedekatan geografis secara realistis, yang memiliki ZEE yang bersambungan, juga karena memiliki kepentingan pragmatis terkait dengan kepentingan menjaga Papua agar tetap dalam naungan NKRI. Langkah ini perlu untuk meredam upaya internasionalisasi Papua oleh kelompok-kelompok separatis Papua. Selama ini RI dan negara-negara Pasifik Selatan ada dalam satu blok suara di fora multilateral, seperti PBB, sehingga logis berbagai (inisiatif) kegiatan untuk menjalankan diplomasi atau festival budaya, wisata kuliner, dan pementasan atau eksebisasi khusus peninggalan budaya Melanesia menjadi penting.<sup>40</sup>

### III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Temuan penelitian memperlihatkan terdapat kecenderungan meningkatnya aktivitas gerakan separatis Papua di fora internasional dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berupaya memanfaatkan setiap kesempatan yang tercipta untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan

<sup>39</sup> Budi Hernawan. "Is a UN resolution on Papua impossible?" *The Jakarta Post*, March 21, 2014, p. 6.

<sup>40</sup> Lihat, "Diplomasi Budaya Melanesia Lewat Kuliner," *Kompas*, 2 Mei 2011, hlm. 11.

mereka dalam rangka memperoleh dukungan politik dari masyarakat internasional untuk kemerdekaan Papua. Aktivitas separatis di fora internasional berkembang kreatif, termasuk dengan meniru dan mengembangkan taktik yang sukses dilakukan di negara lain oleh para pejuang kemerdekaan dan pelaku separatis yang berbeda, selain dengan cara klasik membuka kantor-kantor perwakilan perjuangan di beberapa negara, terus melancarkan kampanye lewat media sosial elektronik, serta berupaya *me-lobby* dan mempengaruhi forum-forum internasional, khususnya PBB. Secara realistis, di sisi lain, perjuangan bersenjata (militer) OPM tidak berhenti, dan terus digunakan untuk mencari kelemahan dan kekeliruan respons yang diperlihatkan aparat keamanan Indonesia, untuk dijadikan bahan kampanye negatif di dunia internasional. Organisasi dan kegiatan OPM di manca negara berkembang terus, dalam rangka mencari dukungan internasional yang lebih luas dan kuat.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan respons Pemerintah Indonesia yang proporsional dan tidak reaktif dalam menyikapi berbagai aktivitas internasional gerakan separatis Papua. Pihak Kemlu tidak menyiapkan *desk khusus* Papua untuk merespons kampanye internasional gerakan separatisme Papua, sebab bagi Kemlu walaupun isu separatisme dirasakan cukup rawan, namun jika direspons dengan *desk khusus* semacam itu, yang dinilai telah berlebihan, justru berbahaya. Pihak asing (dunia internasional) dikhawatirkan dapat menanggapi secara keliru pula.

## **B. Rekomendasi**

Untuk meredam kampanye internasional yang dilakukan kelompok separatis Papua, para anggota, pengikut dan simpatisannya, yang dilancarkan oleh berbagai ormas dan perwakilan mereka di luar negeri, upaya mencegah pelanggaran HAM di bumi Papua harus terus dilakukan. Ini artinya penanganan isu separatisme dengan pendekatan kesejahteraan dan praktek *good*

*governance* harus dilanjutkan secara komprehensif, sedangkan pendekatan keamanan harus dilakukan seminimal mungkin. Walaupun terpaksa dilakukan, itu hanya ditujukan untuk merespons aksi kelompok separatis bersenjata yang dalam aksi-aksinya memang membahayakan aparat dan masyarakat. Harapan dan "janji" Pemerintah SBY untuk melakukan dialog harus segera direalisasikan oleh Pemerintah Jokowi, untuk membangun rasa saling percaya, agar upaya ke arah mencari penyelesaian konflik dapat dilakukan.

Pendekatan aparat keamanan terhadap kelompok terpelajar, terutama mahasiswa, terkait aksi-aksi separatisme harus bijak, dengan menjauhkannya dari aksi-aksi represif. Pendekatan persuasif dan berani melakukan dialog diharapkan muncul dari para perwira di lapangan. Namun sebaliknya, aparat keamanan di lapangan diharapkan tidak mudah terpancing berbagai upaya provokasi aktivis gerakan separatis untuk mendorong aparat keamanan memulai kembali aksi-aksi represif baru. Situasi baru di Indonesia pasca-1998, dengan berakhirnya rezim otoriter Soeharto yang selama ini selalu mengandalkan pendekatan yang represif terhadap para demonstran dan aktivis separatisme, menuntut hadirnya para perwira yang cerdas, berani, sekaligus mampu memenangkan dialog dengan berbagai pihak yang berbeda pendapat secara damai. Aparat keamanan harus menyadari bahwa aksi-aksi represif, apalagi jika telah terjadi indikasi pelanggaran HAM berat terhadap kelompok terpelajar dan cerdik-cendikia, mudah menjadi konsumsi media massa global, dan hanya akan menguntungkan gerakan separatis dan pihak-pihak yang anti-Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku, Jurnal, Makalah:

- Al Araf et.al (eds.). (2011). *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua*. Jakarta: Imparsial.
- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. (2011). *Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Clausewitz, Carl von. (2008). *On War*, Wilder Publications.
- Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik Kompas: Terasing di Pulau Sendiri*. (2009). Jakarta: Kompas.
- Emilia, Ranny. (2013). *Praktek Diplomasi*. Jakarta: Baduosemedia.
- Howard, Michael and Peter Paret (ed.). (1989). *On War*, New Jersey: Princeton University Press.
- I Nguh Suryawan (ed.). (2011). *Tanah Papua di Garis Batas: Perspektif, Refleksi & Tantangan*. Malang: Setara Press.
- "Kampanye Internasional Gerakan Separatis Papua: Bagaimana Indonesia Menghadapinya" (2014). Jakarta: Kemlu.
- Meteray, Bernarda. (2012). *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas.
- Muhibat, Shafiah F (ed.). (2014). *Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Sosial-Politik dan Keamanan*. Jakarta: CSIS.
- "Papua: The Danger of Shutting Down Dialogue," *Background Report*, ICG, 23 March 2006.
- Paret, Peter. (1992). *Understanding War: Essay on Clausewitz and the Histroy of Military Power*. New Jersey: Princeton University Press.
- Permanto, Toto. (2014). "Kebijakan pada Aspek Pertahanan dalam Pengelolaan Keamanan Maritim di Kawasan," makalah dipresentasikan di P3DI tanggal 2 April 2014, Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- "Peta Kekerasan di Indonesia (Mei-Agustus 2012)," *Kajian Perdamaian dan Kebijakan*, Edisi 02/November 2012, The Habibie Center.
- Sinaga, Rosmaida. (2013). *Masa Kuasa Belanda di Papua (1898-1962)*. Depok: Komunitas Bambu, 2013.

## Surat Kabar:

- "Asing Suplai Senjata: Dukung Perjuangan Organisasi Papua Merdeka," *Kompas*, 4 Juli 2014.
- "Atasi Permasalahan Perbatasan: RI-PNG Sepakat Tingkatkan Kerjasama," *Arafura News*, 21 Mei 2014.
- "Äustralia's assistance to Papua Province," *Ausaid*.
- Budi Hernawan. "Is a UN resolution on Papua impossible?" *The Jakarta Post*, March 21, 2014.
- "Digelar Ibadah Respon Dukungan Vanuatu bagi Kemerdekaan Papua," *Tabura Pos*, 8 Agustus 2014.
- "Diplomasi Budaya Melanesia Lewat Kuliner," *Kompas*, 2 Mei 2014.
- Faizal, Elly Burhaini and Nethy Dhrama Somba, "US ambassador visits Papua provinces," *The Jakarta Post*, June 16, 2014.
- "Indonesia Menghargai Sikap Fiji Soal Papua," *Kompas*, 19 Juni 2014.
- "Liputan Dua Wartawan Prancis Ancam NKRI," *Manokwari Express*, 13 Agustus 2014.
- "Mantan Menlu OPM Bantah Klaim Vanuatu," *Kompas*, 27 Maret 2014.
- "Menunggu Kiprah Prajurit-prajurit Profesional untuk Papua," *Kompas*, 12 Mei 2104.
- Numberi, Freddy. "UE dan Pelanggaran HAM di Papua," *Kompas*, 7 Mei 2014.
- "PNG Dinilai Tak Laksanakan Kesepakatan," *Kompas*, 9 Juni 2014.
- "Polisi Duga Keduanya Terlibat Propaganda," *Kompas*, 11 Agustus 2014.
- "Polisi Tangkap Jurnalis Asing," *Kompas*, 8 Agustus 2014.

"Senpi dari PNG untuk Kelompok Purow Wenda," *Papua Pos*, 28 Juni 2014.

"Sidang Tingkat Tinggi PBB: Jangan Abaikan Suara Kesakitan dari Papua," *Suara Pembaruan*, 8-9 Maret 2014.

**Internet:**

"About the Campaign." Free West Papua," <http://freewestpapua.org/background/>, diakses tanggal 28 Maret 2014.

"MSG Hadlines," Sekretariat MSG, <http://www.msgsec.info/index.php/home/86-cherising-our-unique-history>, diakses tanggal 24 Pebruari 2014.

